

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan merupakan salah satu sub sektor ekonomi yang memegang peranan sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang sekaligus berperan sebagai alat dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan pembangunan nasional. Hal ini sangat jelas tercermin dalam pasal (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka menambahkan taraf hidup orang banyak. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary institution*) tidak hanya mempunyai tugas menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat, akan tetapi bank juga harus menyalurkan dana (*lending*) dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiayaan (*financing*) sebagai tugas pokoknya. Pelaksanaan tugas pokok ini diwujudkan bank dengan menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun untuk tujuan yang bersifat produktif dalam bentuk pemberian

pinjaman (kredit) yang disediakan dana bagi pihak-pihak *deficit unit* (membutuhkan dana).

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penyaluran dana dalam bentuk kredit ini biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank. Dengan memberikan kredit atau fasilitas pinjaman, bank telah memberikan uang atau dana dan kepercayaan (*creder*). Dalam hal ini kepercayaan dapat dianggap sebagai jasa. Dengan demikian bank akan berusaha untuk menarik nasabah dengan cara memperbesar dana, memperluas jasa-jasa bank, peningkatan kualitas pelayanan dengan sistem pemasaran yang terpadu.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang selaku bank umum dalam menjalankan salah satu kegiatannya berupa penyaluran kredit, senantiasa mengarahkan kegiatan tersebut pada sektor usaha. Guna mendukung hal tersebut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang menjalankan program pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber

dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu bank nasional yang memperoleh alokasi dana KUR yang cukup besar, selain itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang juga memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit hingga pencairan dana kepada para nasabahnya. Mudahnya akses masyarakat dalam memperoleh kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang sekaligus menunjukkan tingkat risiko terjadinya penyimpangan dan kecurangan pada kegiatan pemberian kredit terutama pada KUR juga cukup besar. Selain itu seringkali tujuan permohonan KUR berbeda dengan realisasinya, dimana KUR yang seharusnya merupakan kredit produktif malah disalahgunakan sebagai kredit konsumtif oleh nasabah, hal ini yang menyebabkan angsuran kredit menjadi tidak lancar karena uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk mengembangkan usaha sesuai dengan tujuan KUR.

Dengan adanya unsur risiko dalam pemberian kredit, dimana kredit merupakan aset bank yang memiliki risiko (*risk asset*) karena aset tersebut dikuasai pihak luar yaitu pihak debitur dan dana yang dipergunakan bank untuk dipinjamkan kepada debitur sebagian besar merupakan titipan masyarakat yang berbentuk deposito, tabungan, dan giro maka, pihak manajemen harus waspada terhadap

semua indikasi dan segera mengambil reaksi terhadap segala gejala keburukan yang timbul. Untuk itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang menerapkan struktur pengendalian internal dan mengevaluasinya melalui audit operasional untuk menilai apakah semua aturan dan prosedur pelaksanaan pemberian kredit telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku agar pencapaian efektivitas pemberian kredit dapat ditingkatkan.

Agoes (2013), mendefinisikan bahwa audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Audit operasional menjadi salah satu alat pengendalian yang membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuan perusahaan dengan efektif dan efisien.

Audit operasional berguna agar manajemen memperoleh informasi mengenai efektivitas dan efisiensi dari unit-unit organisasi di bawah kendali mereka. Dengan adanya audit operasional ini, maka dapat membantu pihak manajemen dalam memberikan peringatan dini atau sistem deteksi dalam menyingkap penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi dan membuat laporan rekomendasi untuk tindakan perbaikan dari organisasi yang dikaji, dalam hal ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Pangkalpinang.

Manfaat audit operasional pada bagian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang adalah sebagai alat bantu manajerial untuk kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemberian kredit khususnya

pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), apakah telah sesuai dengan yang diinginkan perusahaan sekaligus dapat membantu pihak manajemen dalam menerapkan audit operasional yang memadai untuk menilai apakah prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pemberian kredit lebih efektif sekaligus dapat meningkatkan kolektibilitas kredit.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pangkalpinang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran audit operasional dalam meningkatkan efektivitas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang?

Dalam hal ini efektivitas dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi atau sampai seberapa jauh suatu perusahaan dapat dinyatakan berhasil dalam usaha untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas perlu dibatasi maka batasan masalah yang ada pada penelitian ini hanya akan membahas audit operasional pada aktivitas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang. Dengan dilakukannya audit operasional ini dapat menjadi penilaian keefektifan aktivitas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang yaitu untuk mengetahui bagaimanakah peran audit operasional dalam meningkatkan efektivitas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penilaian efektivitas yang dimaksud adalah suatu kegiatan pemeriksaan oleh prosedur-prosedur kegiatan operasional perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Kontribusi riset dapat berupa kontribusi teori, kontribusi praktek dan kontribusi kebijakan. Dengan demikian kontribusi riset dapat didefinisikan sebagai manfaat yang diteliti berupa kontribusi teori, kontribusi praktek dan kontribusi kebijakan dari isu yang diteliti kepada pemakai riset. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Kontribusi Teori adalah hasil dari penelitian dapat memperbaiki teori yang sudah ada, menjelaskan teori yang sudah ada ke fenomena baru atau

menemukan teori baru. Hasil penelitian diharapkan bagi pengembangan bidang keilmuan menjadi bahan-bahan maupun penelitian dan dapat menambah pengetahuan yang diperoleh selama kuliah terutama mengenai audit operasional.

Seluruh rangkaian dalam kegiatan dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi lebih memantapkan fungsi penelitian yang di pelajari. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

Kontribusi praktis menunjukkan bahwa hasil riset dapat digunakan untuk diterapkan di praktek nyata atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki praktek yang ada dengan lebih baik.

Hasil diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan memberikan gambaran tentang pentingnya audit operasional dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan aktivitas manajemen dalam mencapai efektivitas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang.

3. Kontribusi Kebijakan

Kontribusi kebijakan berhubungan dengan manfaat bagi regulator yang mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan publik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pimpinan perusahaan akan pentingnya peran audit operasional dalam

meningkatkan efektivitas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi manajemen untuk terus meningkatkan kinerjanya. Dan juga hal ini dapat menjadi suatu dasar acuan perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Mendeskripsikan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mendeskripsikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu dan rerangka pemikiran.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Mendeskripsikan tentang rancangan penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Mendeskripsikan tentang gambaran umum objek penelitian yang akan diteliti, analisis deskriptif tentang masalah penelitian secara kronologis sesuai dengan tujuan penelitian, dan memaparkan data berdasarkan tahapan-tahapan penelitian yang diinterpretasikan sesuai dengan teori yang ada.

BAB V: PENUTUP

Mendeskripsikan tentang kesimpulan yang ditarik dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

